



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KECAMATAN PELAYANGAN
TAHUN 2013-2018**



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN PELAYANGAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya jualah Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan Pemerintah Kota Jambi telah dapat menyelesaikan penulisan ***“RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PELAYANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 – 2018”*** dengan baik. Pada prinsipnya, dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pelayangan untuk 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pelayangan.

Renstra SKPD Kecamatan Pelayangan merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengoperasionalkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 yang disertai dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai SKPD Kecamatan Pelayangan sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis SKPD ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan dari Kecamatan Pelayangan Pemerintah Kota Jambi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Pelayangan Tahun 2013 - 2018 ini disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan arah kebijakan Bapak Walikota dan Wakil Walikota Jambi Periode 2013 – 2018. Kami menyadari bahwa Buku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pelayangan Tahun 2013 – 2018 ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, kami sangat mengharapkan sumbang saran dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu kami mengharapkan saran kritik yang bersifat membangun sebagai acuan kami di dalam melaksanakan program – program pembangunan yang akan datang khususnya di Kecamatan Pelayangan.

Jambi, Januari 2017
CAMAT PELAYANGAN

NOFIANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19721130 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Tugas Pokok & Fungsi	7
2.1.2 Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya SKPD	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia	14
2.2.2 Inventaris	17
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi	25
3.1.1 Aspek Geografis dan Administrasi Wilayah	26
3.1.2 Aspek Sosial Budaya	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Jambi Berdasarkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 – 2018	30
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kecamatan Pelayanan	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	35

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	Visi dan Misi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi	38
4.1.1	Visi	38
4.1.2	Misi	38
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
4.3.	Strategi dan Kebijakan	40
4.3.1	Strategi	40
4.3.2	Kebijakan	41
BAB V	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	44
6.2	Indikator Kinerja	46
6.3	Kelompok Sasaran	46
6.4	Pendanaan Indikatif	46
BAB VII	PENUTUP	47
Lampiran.		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan..... 8

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Pelayangan 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.a	Jumlah dan Status Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pelayangan Tahun 2014.....	15
Tabel 2.2.1.b	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Menurut Pendidikan	16
Tabel 2.2.2.	Jumlah dan Kondisi Aset Sarana Prasarana di Kecamatan Pelayangan Tahun 2014	17
Tabel 2.3.a	Jenis Pelayanan di Kecamatan Pelayangan.....	18
Tabel 2.3.b	Matrik Jenis Pelayanan Dengan Kelompok Sasaran.....	19
Tabel 2.3.c	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelayangan.....	20
Tabel 2.3.d	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pelayangan	21
Tabel 3.1.2.a	Jumlah Penduduk Kecamatan Pelayangan	27
Tabel 3.1.2.b	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Pelayangan.....	27
Tabel 3.1.2.c	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Pelayangan.....	27
Tabel 3.1.2.d	Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Pelayangan.....	28
Tabel 3.1.2.e	Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Pelayangan.....	28
Tabel 3.1.2.f	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Pelayangan.....	28
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	36
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Otonomi yang luas. Dengan demikian kewenangan yang semula berada pada Pemerintah Pusat kini lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan berdampak secara signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menandai lahirnya paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengadiln dan evaluasi perencanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Berpijak pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah maka Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Jambi Tahun 2013-2018. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintahan Kota Jambi dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Jambi mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan – perencanaan pembangunan

daerah yang memuat visi, misi dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan kerangka otonomi makro disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang Penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi dan RPJM Nasional.

Sejalan dengan proses Penyusunan RPMJD Kota Jambi maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Rencana strategis (RENSTRA) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Kota Jambi yang dipadukan dengan visi Walikota Jambi “TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”.

Kecamatan Pelayangan merupakan salah satu perangkat daerah Kota Jambi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tentu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi. Berdasarkan kebijakan tersebut, Kecamatan Pelayangan memegang peran yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Menindak lanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah maka kecamatan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pelayangan Tahun 2013 – 2018 diharapkan mampu memberikan pedoman dan acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pelayangan dalam periode Tahun 2013 – 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota jambi Tahun 2009 Nomor 13).
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09).
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741).
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12).
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Camat, Sekretariat dan Rincian Tugas Seksi, Sub Bagian serta Tata Kerja Pada Kantor Camat Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta renponsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Pelayangan dengan berpedoman pada Visi dan Misi Kota Jambi dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 serta berbagai aspirasi dari stake holder di Kota Jambi.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan Tahun 2013-2018 berarti secara formal telah tersedia dokumen rencana pembangunan yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Pelayangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pelayangan serta menjadi acuan utama dalam penentuan program daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pelayangan secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas di lapangan dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan untuk Kecamatan Pelayangan.

Berikut ini adalah tujuan adanya Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan Tahun 2013-2018 :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Pelayangan ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menyediakan suatu dokumen rujukan resmi bagi SKPD Kecamatan Pelayangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Jambi.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan Kecamatan Pelayangan dengan Pemerintah Kota Jambi melalui Bappeda sebagai institusi yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar stakeholders dalam menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah khususnya Kecamatan Pelayangan.
5. Sebagai instrumen yang dapat mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Pelayangan.
6. Membangun kebersamaan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar tingkatan pemerintahan maupun stakeholders lainnya (pemerintah kecamatan, swasta dan masyarakat).
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya Kecamatan Pelayangan serta pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya SKPD Kecamatan Pelayangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan mengacu pada kerangka acuan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Pelayangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelayangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pelayangan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Jambi Berdasarkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PELAYANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013-2018

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PELAYANGAN

Kecamatan Pelayangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12).

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Camat, Sekretariat dan Rincian Tugas Seksi, Sub Bagian serta Tata Kerja pada Kantor Camat Kota Jambi.

Kecamatan Pelayangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

2.1.2 Struktur Organisasi

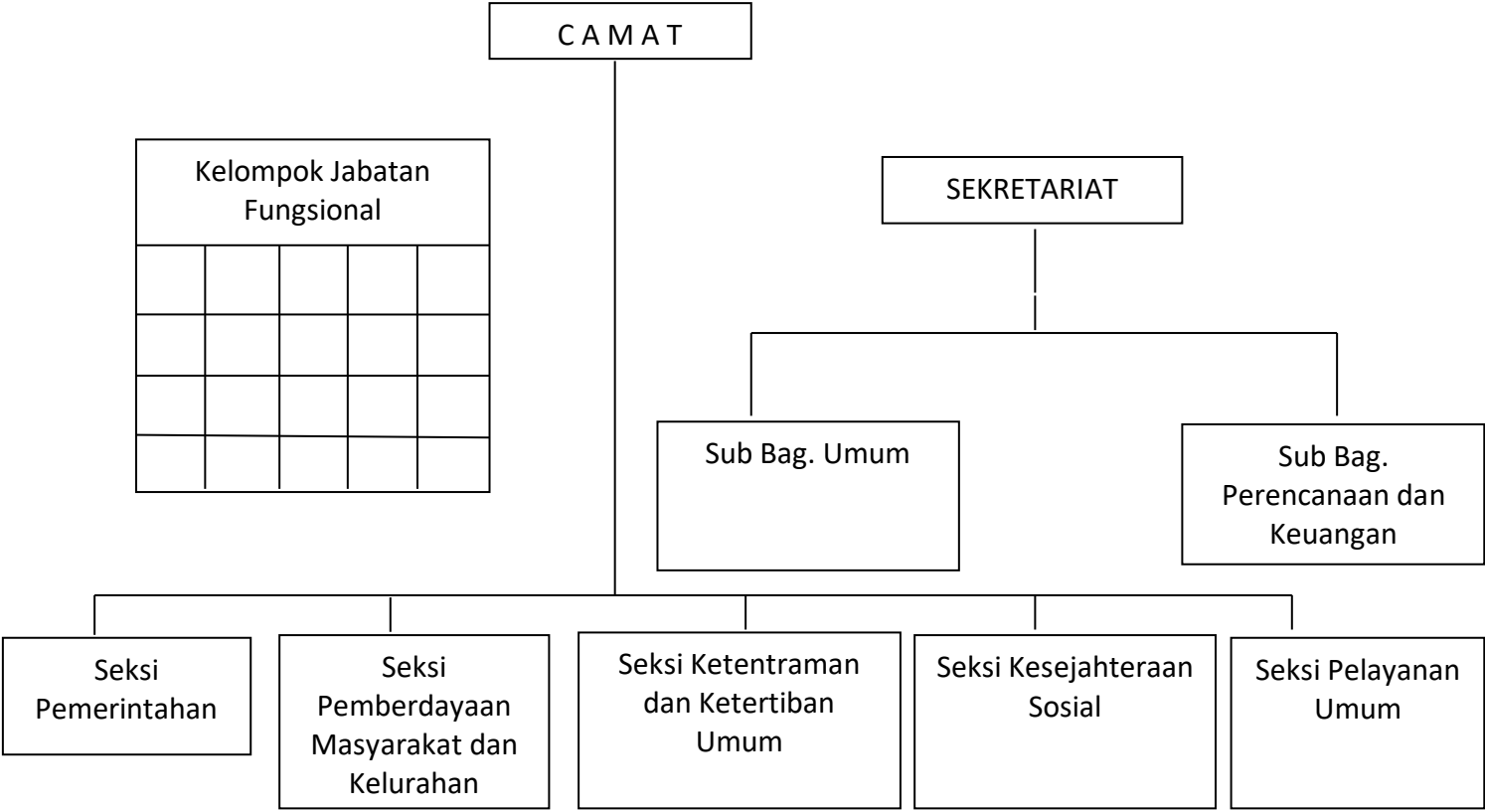
Adapun susunan organisasi Kecamatan Pelayangan adalah sebagai berikut :

- I. Camat
- II. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
- III. Seksi – seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
- IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur Kecamatan Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2009 Tanggal 04 Maret 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pelayanan



Berikut uraian Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretariat dan Rincian Tugas Seksi, Sub Bagian serta Tata Kerja pada Kantor Camat Pelayanan sebagai berikut :

I. CAMAT

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
8. Tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

II. SEKRETARIAT

1. Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
3. Sekretrariat mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Sekretariat menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan di tingkat kecamatan;
5. Sekretariat menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan serta keprotokolan dan hubungan masyarakat;
6. Sekretariat menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
7. Sekretariat menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit kerja;
8. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
9. Sekretariat dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
10. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.

a. SUB BAGIAN UMUM

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum;
2. Menerima, membukukan, mendistribusikan surat masuk, menyortir dan mengirimkan surat kepada satuan kerja lain;
3. Merencanakan kebutuhan, menginventarisir perlengkapan, melaksanakan pengadaan dan melakukan perawatan barang investaris kecamatan;
4. Menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan camat;

5. Menghimpun data dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
6. Melaksanakan kegiatan publikasi, humas dan protocol;
7. Membuat jadwal rapat kegiatan kecamatan;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan;
9. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan / tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan pension;
10. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada kecamatan dan kelurahan;
11. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
12. Menyusun daftar urut kepangkatan dan membuat analisa jabatan;
13. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pension dan kartu asuransi kesehatan;
14. Menyiapkan dan memproses sasaran kinerja pegawai (SKP) dan laporan pajak-pajak pribadi;
15. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
16. Membuat laporan tahunan kecamatan, laporan kinerja dan laporan pengelolaan asset dan barang daerah;
17. Menghimpun dan melakukan penyimpanan administrasi pengelolaan kearsipan;
18. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
2. Menyusun dan menyiapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan;
3. Menyusun dan menyiapkan anggaran kegiatan pemerintahan kecamatan meliputi dokumen KUA PPAS, RKA dan DPA;
4. Melaksanakan dan menyelenggarakan proses pengelolaan keuangan meliputi : pembukuan, perbendaharaan dan kas;
5. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan;

6. Menyusun pertanggung jawaban keuangan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
7. Membuat laporan keuangan Kecamatan;
8. Menghimpun dan menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan;
9. Menghimpun dan melakukan penyimpanan administrasi pengelolaan keuangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan umum;
2. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, informasi komunikasi serta ketenagakerjaan;
3. Melaksanakan penataan pertanahan dan batas kelurahan;
4. Menghimpun dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Menghimpun data kependudukan informasi dan komunikasi , pertanahan, pajak bumi dan bangunan dan batas kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat;
7. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
8. Membantu melaksanakan pengawasan orang asing dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan;
9. Membantu penyusunan pembentukan, penghapusan, pemekaran dan atau penggabungan kelurahan;
10. Membantu penyelenggaraan pembuatan akta tanah, penerimaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
11. Membantu kelancaran penetapan batas kecamatan dan kelurahan;
12. Membantu persiapan dan pelaksanaan ganti rugi objek land reform dang anti rugi tanah rakyat serta membantu pelaksanaan konsolidasi tanah dan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
13. Menyiapkan bahan rapat kerja camat tingkat kota dan provinsi;
14. Membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
15. Menghimpun dan melakukan penyimpanan data administrasi seksi pemerintahan umum;
16. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, teknologi tepat guna, lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
4. Menghimpun data usaha mikro dan kecil di kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan, musyawarah rencana pembangunan kelurahan;
7. Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Menyusun jadwal dan pelaksanaan gotong-royong kebersihan lingkungan;
9. Melakukan pembinaan rukun tetangga, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
10. Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat;
11. Menghimpun data dan menyajikan informasi pemberdayaan masyarakat;
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pembinaan mental dan spritual masyarakat dalam kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga di kecamatan;
4. Membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial di kecamatan;
5. Membantu dan melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana alam di kecamatan;
6. Menghimpun data penyandang masalah kesejahteraan social dan membantu penanganan masalah – masalah sosial di kecamatan;
7. Menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat di kecamatan;
8. Melakukan pembinaan lembaga pengembangan tilawatil qur'an di kecamatan;
9. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga di kecamatan;
10. Menghimpun data dan menyajikan informasi sosial di kecamatan;
11. Melakukan pembinaan usaha kesehatan, keluarga berencana, pangan dan gizi di kecamatan;

12. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Menyusun rencana kerja seksi trantib umum;
2. Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan ketentraman dan ketertiban;
4. Membantu pelaksanaan pengawasan tertib perizinan;
5. Melaksanakan pemberdayaan anggota pol pp yang ada di kecamatan;
6. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan;
7. Membantu kelancaran penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dalam kecamatan;
8. Membantu pengawasan dan pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
9. Membantu organisasi perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan peraturan daerah serta produk hokum lainnya;
10. Membantu organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam wilayah kecamatan;
11. Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan;
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan umum;
2. Melaksanakan pelayanan administrasii terpadu kecamatan;
3. Menyiapkan dan menyajikan data – data pelayanan di kecamatan;
4. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VIII. KELOMPOK FUNGSIONAL

1. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu camat dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat;
3. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan;
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
5. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pelayangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

- a. Pegawai Kantor Camat Pelayangan sebanyak 14 orang terdiri dari :
 - Golongan IV = - orang.
 - Golongan III = 12 orang .
 - Golongan II = 2 orang.
- b. Pegawai yang menduduki Eselon pada Kantor Camat Pelayangan terdiri dari :
 - Eselon III/a = 1 orang.
 - Eselon III/b = 1 orang.
 - Eselon IV/a = 5 orang.
 - Eselon IV/b = 3 orang.
- c. Pegawai Kantor Camat Pelayangan menurut pendidikan terdiri dari :
 - Sarjana/S.1 = 9 orang.
 - SLTA = 5 orang.
- d. Pegawai Kelurahan se-Kecamatan Pelayangan sebanyak 40 orang terdiri dari :
 - Golongan III = 30 orang.
 - Golongan II = 6 orang.
 - Golongan I = 1 orang.
- e. Pegawai Kelurahan yang menduduki Eselon pada Kantor Lurah terdiri dari :
 - Eselon IV/a = 6 orang.
 - Eselon IV/b = 26 orang.
- f. Pegawai Kelurahan menurut pendidikan terdiri dari :
 - Sarjana/S.1 = 22 orang.

- SLTA = 14 orang.
- SLTP = 1 orang.

Sementara itu, jumlah total pegawai yang bertugas pada kantor camat dan kelurahan di Kecamatan Pelayangan mencapai 51 orang, yang didominasi oleh pegawai berstatus PNS yang jumlahnya mencapai 51 orang (100%). Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai menurut status, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada table-tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Jumlah dan Status Pegawai Kecamatan dan Kelurahan
Di Kecamatan Pelayangan Tahun 2014

NO.	UNIT PENEMPATAN	STATUS PEGAWAI				JUMLAH (ORANG)
		PNS DAN CPNS		NON PNS		
		PNS	CPNS	TKK	TKS	
1	2	3	4	5	6	7
A.	KECAMATAN					
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum	1	-	-	-	1
4.	Sub Bagian Keuangan	1	-	-	-	1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	-	-	1
6.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	1
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	1
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	1
9.	Seksi Pelayanan Umum	1				
10.	Staf Pelaksana	4		-	-	4
JUMLAH (ORANG) A		13		-	-	13
		13		0		13
PRESENTASE (%) A		100%	-	0	0	
		100%		0		
B.	KELURAHAN					
1.	Lurah	6	-	-	-	6
2.	Sekretaris Lurah	4	-	-	-	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan	5	-	-	-	5
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5	-	-	-	5
5.	Seksi Kesejahteran Sosial dan Umum	6	-	-	-	6
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	-	-	-	6
7.	Staf Pelaksana	5	-	-	-	5
JUMLAH (ORANG) B		37	-	-	-	37
		37				37

PERSENTASI (%) B	100%	-	-	-	
	100%				

Sumber : Kecamatan Pelayangan, Tahun 2014.

Tabel 2.2.1b
Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pelayangan
Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	UNIT PENEMPATAN	TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR				JUMLAH (ORANG)
		SARJANA		NON SARJANA		
		S3/S2	S1	D4/D3	SLTA/SLTP	
1	2	3	4	5	6	7
A.	KECAMATAN					
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum	-	1	-	-	1
4.	Sub Bagian Keuangan	-	1	-	-	1
6.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	1
7.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	1
8.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	1
9.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	1
10.	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	1
11.	Staf Pelaksana	-	1	-	3	4
JUMLAH (ORANG) A		-	7	-	6	13
		7		6		13
PRESENTASE (%) A		-	64,29%		35,71%	
		64,29%		35,71%		
B.	KELURAHAN					
1.	Lurah	-	6	-	-	6
2.	Sekretaris Lurah	-	3	-	1	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	3	-	2	5
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	3	-	2	5
5.	Seksi Kesejahteran Sosial dan Umum	-	3	-	3	6
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	4	-	2	6
7.	Staf Pelaksana	-	-	-	5	5
JUMLAH (ORANG) B		-	22	-	15	37
		22		15		
PERSENTASI (%) B		-	59,46%	-	40,54%	
		59,46%		40,54%		

Sumber : Kecamatan Pelayangan, Tahun 2014

2.2.2 Inventaris

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pelayangan dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai.

Adapun kondisi asset atau sarana dan prasarana di Kecamatan Pelayangan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Jumlah dan Kondisi Aset Sarana Prasarana
Di Kecamatan Pelayangan Tahun 2014

No. URUT	GOL.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	01	01	TANAH	8	164.000.000
2	02		PERALATAN DAN MESIN		680.697.950
		02	Alat-alat besar	-	-
		03	Alat-alat angkutan	31	-
		04	Alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-
		05	Alat-alat pertanian/peternakan	-	-
		06	Alat-alat kantor dan rumah tangga		
		07	Alat-alat studio dan komunikasi	3	-
		08	Alat-alat kedokteran	-	-
		09	Alat-alat laboratorium	-	-
		10	Alat-alat keamanan	-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	8	1.000.000.000
		11	1. Bangunan gedung	8	1.000.000.000
			2. Bangunan menara/bangunan bukan gedung	-	-
		12	Bangunan monumen	-	-
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN		
		13	1. Jalan	-	
			2. Jembatan	-	-
		14	Bangunan air/irigasi		
		15	Instansi		
		16	Jaringan	-	-
5	05		ASET TETAP LAINNYA	-	-
		17	Buku perpustakaan	-	-
		18	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	-	-
		19	Hewan ternak dan tumbuhan	-	-
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
		20	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
7	07		ASET LAINNYA	-	-
		21	Aset lainnya	-	
			JUMLAH		1.844.697.950

Sumber: Buku Inventaris Aset Kecamatan Pelayangan Tahun 2014.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelayangan

Berpijak pada tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Camat, Sekretariat dan Rincian Tugas Seksi, Sub Bagian serta Tata Kerja pada Kantor Camat Kota Jambi, maka jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelayangan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3.a
Jenis Pelayanan di Kecamatan Pelayangan

No.	PELAYANAN			DASAR HUKUM	KET.
	JENIS	INDIKATOR KINERJA	NILAI		
1.	Administrasi Pelayanan Surat-surat Non Perizinan terdiri dari: a. Surat Jual Beli, Hibah, dll b. Surat Pindah c. Surat Keterangan Kurang mampu d. Surat Keterangan Ahli Waris e. Surat Keterangan Bersih Diri f. Surat Dispensasi Nikah g. Surat Rekomendasi SITU h. Surat Rekomendasi IMB i. Surat Rekomendasi Penelitian Mahasiswa	Waktu Pelayanan	1 hari 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit	PP No.37 Tahun 1998	

Tabel 2.3b
Matrik Jenis Pelayanan Dengan Kelompok Sasaran

NO.	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN				KET.
		MASYARAKAT	ORMAS & PEMUDA	USAHA INDUSTRI/JASA	KELURAHAN	
1.	BIDANG PEMERINTAHAN 1. Kependudukan 2. Pembinaan Idiologi 3. Pembinaan Ketertiban Wilayah 4. Pembinaan Kelurahan 5. Pajak Bumi dan Bangunan	√ √ √ - √	√ √ √ - √	√ √ √ - √	√ √ √ √ √	
2.	BIDANG PEMBANGUNAN 1. Pembangunan Ekonomi & Produksi 2. Pembangunan Lingk. Hidup & Kebersihan 3. Pembangunan Lainnya (Proyek)	- √ -	- √ -	√ √ -	√ √ √	
3.	BIDANG KEMASYARAKATAN 1. Pembinaan Keluarga Berencana 2. Pembinaan Kesehatan 3. Pembinaan Keagamaan 4. Pembinaan Anak, Remaja dan Pemuda	√ √ √ √	- - - √	- - - -	√ √ √ √	

Tabel 2.3c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelayanan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET SPM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET REALISASI SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Perizinan IUMK		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu		75	78	83	88	100	70	78	83	85	-	93,3%	100%	100%	99,2%	-
2	Perizinan IMB				73	75	82	89	100	72	75	80	84	-	98,6%	100%	97%	94 %	-
3	Perizinan HO				75	78	80	90	100	70	75	78	88	-	93,3%	96%	97,5%	97,7%	-
4	Rekom IMB				74	76	83	90	100	71	73	80	85	-	96%	96%	96,3%	94,4%	-
5	Rekom SITU				75	78	83	88	100	70	75	80	88	-	93%	96%	96,3%	100%	-
6	SKBD				70	75	81	90	100	68	72	78	86	-	97%	96%	96,3%	95,5%	-
7	SKAW				75	78	83	92	100	70	75	80	88	-	93%	96%	96,3%	95,6%	-
8	Surat Keterangan				75	78	82	90	100	75	78	82	90	-	100%	100%	100%	100%	-
9	SKTM				75	78	83	92	100	75	78	83	92	-	100%	100%	100%	100%	-
10	Surat Pindah				75	78	83	90	100	68	70	80	85	-	91%	89%	96,3%	94,4%	-

Tabel 2.3d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelayangan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Surat Menyurat Umum Non Perizinan)	-	57,5	-	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Pemberdayaan Masyarakat																		
	1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	50	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Bangkit Berdaya	-	30	-	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3. Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat	-	100	-	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3d
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (ribuan)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
1.Pelayanan Surat-Menyurat Umum Non Perizinan	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100	100	100	34.300	34.300
B. Pemberdayaan Masyarakat																	
1.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5.770	12.000	12.000	12.000	12.000	5.770	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100	100	100	10.754	10.754
2.Bangkit berdaya	54.500	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	54.500	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100	100	100	710.900	710.900
3.Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat	24.300	24.300	33.750	33.750	33.750	24.300	24.300	33.750	33.750	33.750	100	100	100	100	100	29.970	29.970

*) diisi dengan nama SKPD
 **) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
 **) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pelayangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja.
2. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.
3. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
6. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
7. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan melalui koordinasi dan dalam mengimplemantasikan program pembangunan.
8. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan.
3. Adanya indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi

motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi.

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan.
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pembangunan.
6. Ketersediaan Dana APBN dan APBD Provinsi Jambi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.
7. Terdapatnya pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa.
8. Posisi wilayah yang strategis yakni adanya Menara Gentala Arrasy dan Jembatan Pedestrian Arrasy sebagai Icon Kota Jambi yang baru.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pelayangan timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor Internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu Strategis Internal di Lingkungan Kecamatan Pelayangan antara lain :

- a. Sumberdaya manusia yang belum profesional dan terbatas.
Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan. Selain itu masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur kelurahan.
- b. Prasarana belum lengkap.
Prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur di kelurahan masih kurang optimal sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
- c. Sistem kerja yang belum optimal.
Masih lemahnya koordinasi tugas antar seksi baik di kantor camat maupun di kelurahan.
- d. Administrasi yang belum tertib.
Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : hukum, perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
- e. Anggaran dana yang terbatas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pelayangan sehingga belum bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada.

2. Isu-isu Strategis Eksternal antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan dan pemuda dan olah raga.
- b. Belum memadainya kualitas sarana prasana kesehatan, perhubungan, pemukiman, penataan ruang dan lingkungan hidup.

- c. Masih rendahnya kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat meliputi tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta pertanian.
- d. Belum memadainya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan dan dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
- e. Masih biasanya Tapal Batas antara Kecamatan Pelayangan dan Kabupaten Muaro Jambi sehingga menimbulkan masalah sengketa pertanahan.
- f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Pelayangan.

3.1.1.Aspek Geografis dan Administrasi Wilayah

Kecamatan Pelayangan merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di wilayah Kota Jambi yang memiliki luas $\pm 15,29 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Tengah
2. Kelurahan Jelmu
3. Kelurahan Mudung Laut
4. Kelurahan Arab Melayu
5. Kelurahan Tahtul Yaman
6. Kelurahan Tanjung Johor

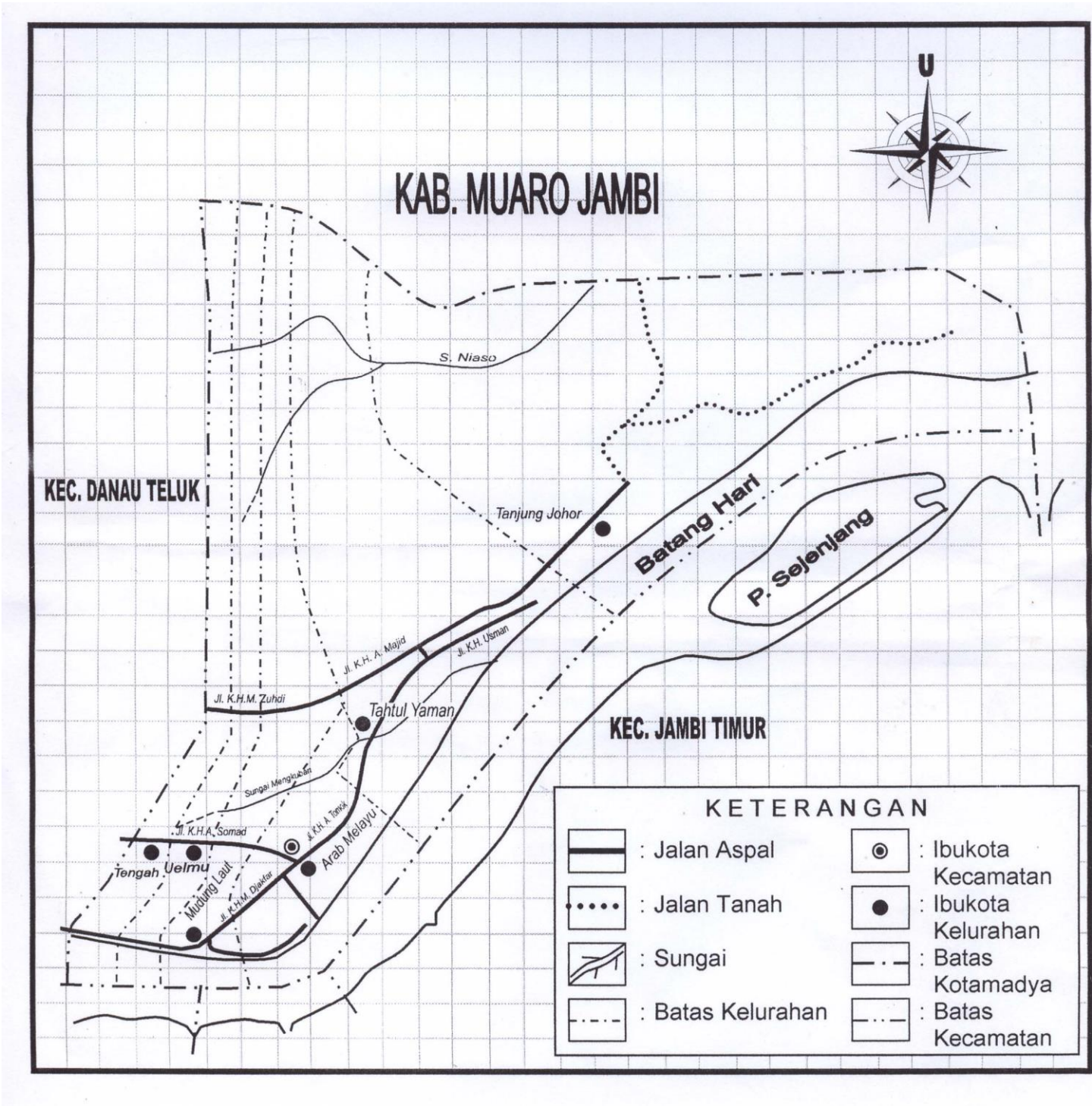
Serta terdiri dari 46 RT.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Hari.
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Danau Teluk.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan topografi keadaan Kecamatan Pelayangan merupakan dataran rendah dengan sedikit dataran tinggi dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 meter dari permukaan laut dan berada di sepanjang Sungai Batang Hari. Orbitrasi wilayah merupakan cekungan dan merupakan wilayah rawan banjir.

Tabel. 3.1
Peta Wilayah Kecamatan Pelayangan



3.1.2. Aspek Sosial Budaya

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Pelayangan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013 tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2.a
Jumlah Penduduk Kecamatan Pelayangan

No.	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Tengah	238	373	427
2.	Jelmu	191	308	332
3.	Mudung Laut	400	883	917
4.	Arab Melayu	1.094	2.176	2.104
5.	Tahtul Yaman	890	1.668	1.755
6.	Tanjung Johor	636	1.343	1.157
	Kecamatan	3.449	6.751	6.692
	Jumlah	3.449	13.443	

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan memegang peranan penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang ada pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut ini jumlah sekolah di Kecamatan Pelayangan :

Tabel 3.1.2.b
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Pelayangan

No.	Kelurahan	TK	Sekolah Dasar		Madrasah & Ponpes	SLTP		SLTA	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jelmu	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	Mudung Laut	1	1	-	1	-	-	-	-
4.	Arab Melayu	2	1	-	2	-	-	-	-
5.	Tahtul Yaman	1	1	-	2	1	-	-	-
6.	Tanjung Johor	1	1	-	2	-	-	-	-
	Jumlah	5	5	-	7	1	-	-	-

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan memegang peranan penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut ini kondisi kesehatan di Kecamatan Pelayangan :

Tabel 3.1.2.c
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Pelayangan

No.	Kelurahan	Rumah Sakit /Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Praktek	Pos	
					KB	Yandu
1.	Tengah	-	1	-	1	1
2.	Jelmu	-	-	-	1	1
3.	Mudung Laut	-	1	-	1	3
4.	Arab Melayu	-	-	1	1	3

5.	Tahtul Yaman	1	-	-	1	3
6.	Tanjung Johor	-	1	-	1	1
	Jumlah	1	3	1	6	12

d. **Perekonomian**

Berikut ini sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Pelayangan :

Tabel 3.1.2.d
Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Pelayangan

No.	Kelurahan	SARANA PASAR			
		Pasar	Toko/Warung	KUD	Industri
1.	Tengah	-	8	-	-
2.	Jelmu	-	9	-	-
3.	Mudung Laut	-	15	1	-
4.	Arab Melayu	1	36	-	1
5.	Tahtul Yaman	-	17	-	-
6.	Tanjung Johor	-	17	-	2
	Jumlah	1	102	1	3

e. **Keagamaan**

Dilihat dari Sarana Peribadatan di Kecamatan Pelayangan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.e
Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Pelayangan

No.	Kelurahan	Masjid/Langgar	Gereja	Wihara	Pura
1.	Tengah	2	-	-	-
2.	Jelmu	1	-	-	-
3.	Mudung Laut	4	-	-	-
4.	Arab Melayu	5	-	-	-
5.	Tahtul Yaman	6	-	-	-
6.	Tanjung Johor	5	-	-	-
	Jumlah	23	-	-	-

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.f
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Pelayangan

No.	Kelurahan	Pemeluk Agama				
		Islam	Katolik	Kristen	Budha	Hindu
1.	Tengah	800	-	-	-	-
2.	Jelmu	640	-	-	-	-
3.	Mudung Laut	1800	-	-	-	-
4.	Arab Melayu	4280	-	-	-	-
5.	Tahtul Yaman	3423	-	-	-	-
6.	Tanjung Johor	2500	-	-	-	-
	Jumlah	13.443	-	-	-	-

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Jambi Berdasarkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018

3.2.1 Visi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maka Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktu 2013-2018 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

VISI

TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA

Pusat Perdagangan Barang dan Jasa :Sesuai dengan rencana pada ruang dan rencana zonasi RTRWK pusat perdagangan dan jasa merupakan kawasan pengembangan aktifitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayan local dan regional

Berbasis Masyarakat :Community Based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali,menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan.

Berakhlak :Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun.Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang

memberikan pelayanan mau pun yang menerima pelayanan.

Berbudaya

:Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran , keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Jambi Periode 2013 – 2018 sebagai berikut :

- 1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.
- 2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemendirian daerah.
- 3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak , berbudaya dan berdaya saing.
- 4. Mewujudkan pemerintah yang profesional dan bersih.
- 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang diselaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi Tahun 2005-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi lima tahun kedepan (2013-2018) adalah sebagai berikut :

MISI I MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PERKOTAA YANG MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
Tujuan 1	:	Meningkatkan dan mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perkotana yang berkualitas
Sasaran	:	1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan 2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.

Tujuan 2	:	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman
Sasaran	:	1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pembangunan
Tujuan 3	:	Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotana yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan
Sasaran	:	1. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH 2. Terwujudnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan yang baik dan berkelanjutan

MISI II MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BERBASIS POTENSI LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH		
Tujuan 1	:	Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang Berpihak kepada Masyarakat, Menyeluruh, Seimbang, Konsisten dan Adil Berbasis Potensi Daerah
Sasaran	:	1. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian 2. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional 3. Terciptanya ruang representative bagi PKL 4. Terwujudnya Peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar

MISI III MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG BERKUALITAS, BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING		
Tujuan 1	:	Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi yang berakhlak dan berbudaya melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
Sasaran	:	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
Tujuan 2	:	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang berakhlak dan revitalisasi infrastruktur kesehatan
Sasaran	:	1. Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua
Tujuan 3	:	Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama
Sasaran	:	1. Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama
Tujuan 4	:	Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja
Sasaran	:	1. Terciptanya lapangan pekerjaan 2. Tersedianya tenaga kerja local yang berdaya saing
Tujuan 5	:	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pengarustamaan Gender di semua aspek pembangunan
Sasaran	:	1. Terkendalinya angka kelahiran penduduk 2. Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan

MISI IV MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFFESIONAL DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE)		
Tujuan	:	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>clean governance</i>)
Sasaran	:	1. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan public 2. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan 3. Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas

MISI V MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KEAMANAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL		
Tujuan	:	Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal
Sasaran	:	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS 2. Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni, budaya dan olah raga 3. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 ini, selain menyelesaikan isu yang ebrsifat local, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti lingkungan hidup dan penaraan ruang. Sedangkan untuk Kecamatan Pelayangan, Renstra mengacu pada RPJMD Kota Jambi pada Misi ke empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (*Clean Governance*) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
RPJMD Kota Jambi 2013-2018 Terkait dengan Kecamatan Pelayangan

Misi (4)	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (<i>Clean Governance</i>)
TUJUAN	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>).
SASARAN	1. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan public 2. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintah 3. Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas
STRATEGI	Peningkatan jangkauan dan sasaran strategis
ARAH KEBIJAKAN	Menerapkan SOP dalam pelayanan Publik

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kecamatan Pelayangan

Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Pelayangan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong pelaksanaan pelayanan yaitu :

- a. Tersedianya jumlah sumber daya manusia atau aparatur.
- b. Tersedianya sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Terciptanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dan hubungan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- d. Adanya Visi dan Misi kecamatan Pelayangan.
- e. Tuntutan Implementasi Good Governance merupakan peluang bagi Kantor Camat Pelayangan dalam meningkatkan pelayanan.
- f. Keberadaan organisasi pemerintah sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
- g. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan di antaranya adalah :

- a. Masih lemahnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Pelayangan sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
- b. Masih terbatasnya sumberdaya yang ada dalam hal ini jumlah pegawai/staf.
- c. Ketersediaan data yang belum maksimal, padahal ini sangat sekali dalam pelaksanaan program yang ada.
- d. Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas menyebabkan pelayanan yang dilaksanakan belum prima.
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.
- f. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- g. Kurangnya koordiansi atau dukungan dinas /instansi dalam pembangunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanahan dan keamanan. Adanya rencanan tata ruang wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, adan/dunia usaha dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2018 mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk arahan pembangunan di Kecamatan Pelayangan. Faktor-faktor pendorong dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 yang mempengaruhi pembangunan diantaranya adalah:

1. Kecamatan Pelayangan (Kelurahan Mudung Laut dan Arab Melayu) termasuk Bagian Wilayah Kota (BWK) IV dengan fungsi utama sebagai pusat pariwisata baik skala lokal maupun nasional.
2. Kecamatan Pelayangan termasuk pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Tanjung Johor.
3. Termasuk daerah untuk pengembangan sarana transportasi perairan sungai.
4. Termasuk kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran actual kondisi Kecamatan Pelayangan saat ini, isu-isu strategis yang tumbuh dan berkembang antara lain :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Jambi kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kota Jambi.
2. Optimalisasi partisipasi atau pemberdayaan masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan

- dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Corporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan Pelayangan sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yakni pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasi dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
 4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
 5. Sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata budaya dan wisata bernuansa islami serta tempat berdirinya Icon Kota Jambi yang baru dimana Kecamatan Pelayangan terdapat beberapa pondok pesantren, pengrajin Batik Jambi yang trampil dan memiliki Menara Jam Besar “Gentala Arrasy” serta Jembatan Pedestrian “Titian Arrasy”. Kecamatan Pelayangan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pelayangan harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
 6. Sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian dengan lahan pertanian yang luas di Kota Jambi maka Kecamatan Pelayangan akan menjadi salah satu kawasan utama pengembangan agribisnis unggulan, ruang terbuka hijau serta pengelolaan daerah aliran Sungai Batang Hari. Oleh sebab diperlukan peningkatan kualitas petani baik pengetahuan maupun keterampilan petani guna mendorong produksi

pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup petani dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN PELAYANGAN KOTA JAMBI

4.1.1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan berpotensi untuk terwujud tentang apa dan kemana tujuan suatu organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan Pelayangan adalah :

“Terwujudnya Kecamatan Pelayangan Menjadi Kecamatan Terdepan dalam Pengembangan Pendidikan dan Budaya yang Bernuansa Islami, Sentra Kerajinan Khas Daerah Jambi yang Berdaya Saing Tinggi serta Kawasan Pengembangan Sektor Agribisnis Unggulan Kota Jambi”

Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kecamatan Pelayangan agar berkembang secara berkelanjutan (sustainable) dan mendukung Visi Kota Jambi yaitu ***Mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa berbasis Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.***

4.1.2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari VISI yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan

programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

Adapun Misi Kecamatan Pelayangan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan pengembangan pendidikan, kegiatan serta budaya yang bernafaskan islami sebagai karakteristik masyarakat Kecamatan Pelayangan.
2. Mewujudkan Kecamatan Pelayangan sebagai pusat pengembangan berbagai usaha kerajinan khas Daerah Jambi berbasis pada penguatan ekonomi kerakyatan, usaha kecil dan menengah.
3. Menjadikan salah satu kawasan utama pengembangan sektor agribisnis unggulan, ruang terbuka hijau serta pengelolaan daerah aliran (DAS) Sungai Batang Hari.
4. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implimentasi dari pernyataan misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pelayangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Mewujudkan Kecamatan Pelayangan sebagai Pusat Pengembangan Berbagai Usaha Kerajinan Khas Daerah Jambi Berbasis pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Keci dan Menengah.	1. Meningkatkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan kepada masyarakat 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan kepada masyarakat	- Meningkatkan pelayanan adminsitasi sarana dan prasaran kelembagaan - Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan manajemen (tata

	kerja) kelembagaan
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan	- Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan - Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan

Tabel 4.3
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pelayanan

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Sarana Publik	1. Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu	75	78	83	90	100
	2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80	83	90	95	100
	3. Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang Kecamatan	70	74	80	93	100
	4. Persentase sarana dan prasarana publik yang dibangun	75	80	85	95	100
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	1. Tingkat survey kepuasan masyarakat	80	83	89	94	100
	2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	77	80	88	96	100
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan	83	87	90	97	100
	2. inspektorat yang ditindaklanjuti	70	75	80	90	100

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai Tujuan dan sasaran Misi Kecamatan Pelayanan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi sarana dan prasarana kelembagaan
2. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dan manajemen (tata kerja) kelembagaan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan . Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan maka dirumuskan kebijakan. Kebijakan Kecamatan Pelayangan Tahun 2013 – 2018 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan kebijakan umum anggaran yang lebih berorientasi kepada peningkatan partisipasi masyarakat untuk tercapainya pengembangan kegiatan pendidikan dan kebudayaan Islam di Kecamatan Pelayangan.
2. Menginventarisasi SDM Kecamatan Pelayangan untuk diikutsertakan pada berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pemberian pelayanan yang ada di Kecamatan Pelayangan.
3. Mendorong pemanfaat teknologi informasi di Kecamatan Pelayangan.
4. Memperkuat kajian-kajian pendukung perencanaan.

BAB V

HUBUNGAN INDIKATOR SASARAN RPJMD DENGAN INDIKATOR SASARAN KECAMATAN PELAYANGAN

Dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Jambi ***"Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya"***. Kecamatan Pelayangan sebagai organisasi Pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Misi ke-4 (empat) dari Pemerintahan Kota Jambi yaitu ***"Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governance)"*** dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018, Kecamatan Pelayangan mempunyai Visi yaitu : ***" Terwujudnya Kecamatan Pelayangan Menjadi Kecamatan Terdepan dalam Pengembangan Pendidikan dan Budaya yang Bernuansa Islami, Sentra Kerajinan Khas Daerah Jambi yang Berdaya Saing Tinggi serta Kawasan Pengembangan Sektor Agribisnis Unggulan Kota Jambi"***. Misi Kecamatan Pelayangan yaitu : ***"Mewujudkan Kecamatan Pelayangan sebagai Pusat Pengembangan Berbagai Usaha Kerajinan Khas Daerah Jambi Berbasis pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Kecil dan Menengah"***. Indikator kinerja sasaran dalam melaksana misi Kecamatan Pelayangan yaitu :

Tabel 5.1
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pelayanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Meningkatkan pelayanan adminsitasi sarana dan prasarana kelembagaan	1. Rasio waktu pelayanan adminsitasi umum tepat waktu	%	75	78	83	90	100	
2. Meningkatkan kemampuan sumebr daya aparatur dan manajemen (tata kerja) kelembagaan)	1. Rasio lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80	83	90	95	100	
	2. Rasio tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang Kecamatan	%	70	74	80	93	100	
	3. Rasio sarana dan prasarana publisik yang dibangun	%	75	80	85	95	100	
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	1. Tingkat survey kepuasan masyarakat	%	80	83	89	94	100	
	2. Rasio keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	77	80	88	96	100	
4. Meningakatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	%	83	87	90	97	100	
	2. Rasio temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	%	70	75	80	90	100	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

Dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013–2018 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pokok pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- (3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- (4) Penyediaan Jasa Kebersihan
- (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- (11) Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam.
- (12) Perjalanan Dinas

2. Kegiatan Pokok pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

- (1) Pembangunan Gedung Kantor
- (2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- (3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- (4) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (5) Pengadaan Mebeleur
- (6) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
- (7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (8) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- (9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.

3. Kegiatan Pokok pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah :

- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (2) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Kegiatan pokok pada Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur adalah :

- (1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Kegiatan pokok pada Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah:

- (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan LAKIP
 - Penyusunan Laporan Tahunan

6. Kegiatan pokok pada Program Perencanaan SKPD adalah :

- (1) Perencanaan SKPD
 - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

7. Kegiatan pokok Pemberdayaan Kecamatan adalah:

- (1) Bangkit Berdaya
- (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

- (3) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- (4) Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan
- (5) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
- (6) Kegiatan SAMISAKE
- (7) Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula

6.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan tingkat capaian yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan pembangunan daerah, khususnya dibidang pelayanan terpadu Kecamatan. Untuk indikator masing- masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Indikator Kinerja Renstra Kecamatan Pelayanan Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada lampiran III.

6.3 Kelompok Sasaran

6.3.1 Urusan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kelompok sasaran dalam pembangunan bidang Pelayanan Terpadu Kecamatan yaitu :

- a. Penduduk Kecamatan Pelayanan Kota Jambi.
- b. Terlaksananya Waktu Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu.
- c. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.
- d. Terwujudnya Tingkat Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang hadir pada Musrenbang Kecamatan.
- e. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Publik yang dibangun.
- f. Tercapainya Kepuasan Masyarakat.
- g. Terlaksananya Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti.
- h. Tersedianya AKIP.
- i. Terlaksananya temuan inspektorat yang ditindaklanjuti.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun kedepan di sesuaikan dengan kebutuhan dari masing – masing program dan kegiatan serta disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Jambi, terutama menuju Kota Jambi BANGKIT 2015. Secara rinci dapat dilihat pada daftar Lampiran.

BAB VII PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Pelayangan telah menyusun visi, misi dan rencana strategis SKPD yang akan menjadi Pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di lingkungan Kecamatan Pelayangan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Pelayangan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kota Jambi secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinyu (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan, untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat

dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu " **Terwujudnya Kecamatan Pelayangan Menjadi Kecamatan Terdepan dalam Pengembangan Pendidikan dan Budaya yang Bernuansa Islami, Sentra Kerajinan Khas Daerah Jambi yang Berdaya Saing Tinggi serta Kawasan Pengembangan Sektor Agribisnis Unggulan Kota Jambi**". Amin.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014-P		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD		Unit Kerja SKPD	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Perlengkapan Penunjang Administrasi				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	100	538,994,009	100	364,267,011	100	504,000,013	100	507,000,015	100	507,000,017	100	2,421,261,019	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
	2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Yang Ramah, Cepat dan Transparan	Tersedianya tenaga pengantar surat pada Kecamatan			1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan tenaga pengantar surat pada Kecamatan terpenuhi	0	100	7,800,000	100	4,200,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	30,000,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Terpenuhinya kebutuhan rek telepon, air & listrik kantor dan rumah dinas			2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rek. Telepon, Air dan Listrik.	0	100	37,800,000	100	43,800,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	306,600,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Tersedianya data admin keuangan yg valid& akurat.			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan keuangan yang baik	0	100	87,852,000	100	82,412,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	470,264,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Terwujudnya kebersihan kantor.			4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Barang kebersihan kantor, Honorium Cleaning Service upah js,tagihan	0	100	11,400,000	100	12,200,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	83,600,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Tersedianya alat tulis kantor bagi kegiatan administrasi.			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	0	100	31,500,000	100	24,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	175,500,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bagi administrasi Perkantoran			6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan & pnggandaan bagi adm. perkantoran.	0	100	19,342,000	100	14,655,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	123,997,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Tersedianya lampu untuk penerangan bangunan kantor.			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan lampu untuk penerangan bangunan kantor.	0	100	13,700,000	100	8,700,000	100	15,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	73,400,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	0	100	3,600,000	100	3,600,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	19,200,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Tersedianya surat kabar sbg sumber informasi			9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan Tamu	0	100	34,000,000	100	19,300,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	173,300,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Tamu			10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordn. dan konsultasi keluar daerah	0	100	221,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	221,200,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Terwujudnya keamanan kantor dan tersedianya			11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi,	Penyediaan jasa pengamanan kantor,	0	100	78,600,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	398,600,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan
		Terwujudnya SDM yg memiliki wawasan dan ketrampilan.			12	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	0	100	-	100	75,600,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	375,600,000	Kec. Pelayanan	Kec. Pelayanan

				Program dan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD	
							2014-P	2015	2016	2017	2018	Kontribusi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (output)	Awal Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung-jawab	Lokasi
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	100	1,761,653,009	100	2,700,279,011	100	1,024,500,013	80	1,027,500,015	100	947,500,017	100	7,461,432,065	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Tersedianya sarana tempat kerja yang kondusif				1	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pelayanan yang optimal	0	100	1,162,217,000	100	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	100	3,162,217,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang baik				2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0	100	134,180,000	100	73,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100	732,180,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Terwujudnya penyediaan peralatan kantor yang baik				3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksana penyediaan peralatan perkantoran yang baik	0	100	104,800,000	100	24,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	429,300,000	Kec.Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Terwujudnya mebeleur yang baik .				4	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraana operasional yang baik	0	-	-	100	280,000,000	100	280,000,000	100	280,000,000	100	200,000,000	100	1,040,000,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran					1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	100	227,004,009	100	192,367,011	100	288,500,013	100	291,500,015	100	291,500,017	100	1,290,871,019	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
	2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Yang Ramah, Cepat dan Transparan	Tersedianya tenaga pengantar surat pada Kecamatan				1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan tenaga pengantar surat pada Kecamatan terpenuhi	0	100	7,800,000	100	4,200,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	30,000,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Terpenuhinya kebutuhan rek telepon, air & listrik kantor dan rumah dinas				2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rek. Telepon, Air dan Listrik.	0	100	37,800,000	100	43,800,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	306,600,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Tersedianya data admin keuangan yg valid& akurat.				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan keuangan yang baik	0	100	87,852,000	100	82,412,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	470,264,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Terwujudnya kebersihan kantor.				4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Barang kebersihan kantor, Honorium Cleaning Service upah js,tagihan retribusi,	0	100	11,400,000	100	12,200,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	83,600,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Tersedianya alat tulis kantor bagi kegiatan administrasi.				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksanannya penyedian alat tulis kantor	0	100	31,500,000	100	24,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	175,500,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Tersedianya barang cetakan dan pengadaan bagi administrasi Perkantoran				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan & pnggandaan bagi adm. perkantoran.	0	100	19,342,000	100	14,655,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	123,997,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							2014-P		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Tersedianya lampu untuk penerangan bangunan kantor.			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan lampu untuk penerangan bangunan kantor.	0	100	13,700,000	100	8,700,000	100	15,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	73,400,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	0	100	3,600,000	100	3,600,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	19,200,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Terciptanya pegawai yang cakap dan terampil			1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya kursus –kursus singkat/pelatihan	0	100	21,810,000	100	3,000,000	100	4,500,000	100	4,500,000	100	4,500,000	100	38,310,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Laporan Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014-P		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat oleh Aparatur Kecamatan dengan Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Sarana Publik	Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pembangunan yang searah dan berkesinambungan	0	75	Rp 596,282,000	78	Rp 533,073,000	83	Rp 550,000,000	90	Rp 550,000,000	100	Rp 550,000,000	100	Rp 2,779,355,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya administrasi pemerintahan kelurahan	0	80	Rp 191,850,000	83	Rp 147,000,000	90	Rp 180,000,000	95	Rp 250,000,000	100	Rp 250,000,000	100	Rp 1,018,850,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pembangunan yang searah dan berkesinambungan	0	70	Rp 596,282,000	74	Rp 533,073,000	80	Rp 550,000,000	93	Rp 550,000,000	100	Rp 550,000,000	100	Rp 2,779,355,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Persentase sarana dan prasarana publik yang dibangun				Bangkit Berdaya	Terlaksananya pembangunan infrastruktur di Wilayah Kecamatan Pelayangan	0	75	Rp 54,500,000	80	Rp 500,000,000	85	Rp 1,000,000,000	95	Rp 1,000,000,000	100	Rp 1,000,000,000	100	Rp 2,555,500,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Meningkatkan kinerja penyenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan				Pembinaan pelayanan administrasi kependudukan	Terlaksananya administrasi kependudukan yang baik	0	80	Rp 34,500,000	83	Rp 34,500,000	89	Rp 40,000,000	94	Rp 45,000,000	100	Rp 45,000,000	100	Rp 199,000,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pembangunan yang searah dan berkesinambungan	0	77	Rp 596,282,000	80	Rp 533,073,000	88	Rp 550,000,000	96	Rp 550,000,000	100	Rp 550,000,000	100	Rp 2,779,355,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan AKIP dari kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai aturan	0	83	Rp 5,785,000	87	Rp 5,000,000	90	Rp 5,000,000	97	Rp 6,000,000	100	Rp 6,000,000	100	Rp 27,785,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan
		Persentase temuan inspektorat yang ditindaklanjuti				Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya berbagai program kerja dan kegiatan pada Kecamatan dan Kelurahan	0	70	Rp 6,600,000	75	Rp 5,000,000	80	Rp 12,000,000	90	Rp 12,000,000	100	Rp 12,000,000	100	Rp 47,600,000	Kec. Pelayangan	Kec. Pelayangan